

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah besar dalam pembangunan pendidikan kita adalah masih rendahnya mutu pendidikan itu sendiri. Berbagai upaya telah kita laksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari peningkatan anggaran pendidikan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan dan kesejahteraannya, peningkatan fasilitas, sampai peningkatan dalam manajemen penyelenggaraannya. Namun demikian, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Mutu pendidikan kita masih jauh dari apa yang kita harapkan.

Kita menyadari betul akan perlunya meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan telah lama diangkat menjadi salah satu kebijaksanaan pembangunan pendidikan. Misi pembangunan pendidikan kita saat ini adalah, *"Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia."* (GBHN Tahun 1999-2004/Tap. MPR No. IV Tahun 1999).

Namun demikian, upaya peningkatan mutu pendidikan ternyata tidaklah mudah. Banyak faktor yang masih menghambat upaya tersebut. Menurut

Suyanto dan Abbas (2001:69), salah satu sebab sulitnya meningkatkan mutu pendidikan kita selama ini adalah model pengelolaannya yang sentralistik. Model ini paling tidak mengakibatkan dua hal paling penting. *Pertama*, kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah tidak merasa sepenuhnya bertanggungjawab terhadap berbagai kelemahan proses yang berlangsung di dalamnya, karena ketidakmandiriannya dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. *Kedua*, masyarakat sekitar dan orang tua siswa tidak merasa sepenuhnya memiliki sekolah (yang akibatnya tidak merasa ikut bertanggungjawab terhadap keberadaannya).

Sementara itu, Indra Djati Sidi (2001:14) berpendapat bahwa kurang berhasilnya upaya peningkatan mutu pendidikan kita adalah karena pembangunan pendidikan selama ini didasarkan pada konsepsi *input-output analysis* atau *education production function*. Konsep ini ternyata tidak selalu dapat diterapkan dalam pembangunan pendidikan, walaupun teori tersebut berhasil dalam dunia industri. Paradigma ini berakar pada teori bidang ekonomi produksi yang berkeyakinan bahwa apabila *input*-nya diperbaiki maka secara otomatis *output*-nya menjadi baik. Padahal, menurutnya, *input* pendidikan itu tidak sama dengan *input* di bidang industri. *Input* di bidang industri itu statis sementara *input* pendidikan itu dinamis, banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya faktor proses dan konteks. Oleh karena itu, paradigma sistem pendidikan nasional harus mencakup kedua faktor tersebut (proses dan konteks) selain *input* dan *output*. Bahkan dalam hal pendidikan, *input* justru tidak terlalu dipermasalahkan.

Faktor-faktor proses dan konteks itulah yang malah menentukan *output* pendidikan.

Selanjutnya Indra Djati Sidi menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan nasional masa depan, perhatian perbaikan sistem pendidikan nasional harus ditujukan pada aspek-aspek : kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan, manajemen pendidikan dan *partisipasi masyarakat* dalam penyelenggaraan pendidikan.

Lebih jauh tentang manajemen pendidikan, perbaikan manajemen diarahkan untuk lebih memberdayakan sekolah sebagai unit pelaksana terdepan dalam kegiatan belajar mengajar disekolah. Di era otonomi di mana manajemen pendidikan diarahkan untuk lebih memberdayakan sekolah sehingga sekolah menjadi lebih mandiri dan bersikap kreatif, dapat mengembangkan iklim kompetitif antar sekolah di wilayahnya, serta bertanggungjawab terhadap *stakeholders* pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat, manajemen pendidikan harus lebih terbuka, *accountable* (dapat mempertanggungjawabkan semua program kegiatannya), *mengoptimalkan partisipasi orang tua dan masyarakat*, serta dapat mengelola semua sumber daya yang tersedia di sekolah dan lingkungannya untuk digunakan seluas-luasnya bagi peningkatan prestasi siswa dan mutu pendidikan pada umumnya (Indra Djati Sidi, *ibid*:20).

Indra Djati Sidi (*ibid*: 33) juga menyebutkan beberapa masalah yang membuat upaya peningkatan mutu pendidikan itu tidak berjalan. Masalah-masalah tersebut jugalah yang menjadi sebab pentingnya dilakukan otonomi sekolah. Masalah-masalah tersebut adalah :

1. akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah
2. penggunaan sumber daya tidak optimal
3. *partisipasi masyarakat masih rendah*
4. sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannya

berkenaan dengan rendahnya partisipasi masyarakat Indra Djati Sidi mengatakan :

“Sebenarnya, secara historis, peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan di tanah air sangat besar. Tetapi strategi pemerintah dalam pembangunan pendidikan selama ini belum mampu menggali potensi tersebut, bahkan dalam beberapa kasus mematikannya. Dalam skala mikro sekolah, marginalisasi peran serta masyarakat dan orang tua dalam pengelolaan pendidikan diwujudkan dengan adanya lembaga BP3 sekolah yang perannya tidak hanya sebatas sebagai sumber dana tambahan bagi sekolah. Tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban anggota BP3 dalam manajemen sekolah telah menjadikan lembaga yang seharusnya mewadahi partisipasi masyarakat dan orang tua ini menjadi lembaga yang tidak banyak diminati anggotanya. Keadaan seperti ini harus segera dikoreksi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Masyarakat dan orang tua sudah saatnya diikutsertakan dalam pengambilalihan keputusan yang dilakukan oleh sekolah. ..”

Kita semua telah menyadari bahwa pembangunan pendidikan bukanlah tanggungjawab pemerintah semata, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu sudah semestinya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan bidang pendidikan. Sebaliknya, masyarakat pun berkewajiban untuk berpartisipasi dan tidak menyerahkannya sepenuhnya kepada pemerintah semata-mata. Tilaar (1999: 114-115) mengatakan bahwa apabila administrasi dan

manajemen pendidikan nasional tidak memberikan tempat yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat maka lembaga pendidikan akan terasing dari pengabdianya bagi kebutuhan masyarakat yang nyata. Sejalan dengan itu akhir-akhir ini telah diluncurkan konsep *community based education* oleh UNICEF, yaitu pendidikan yang diabdikan untuk, bersama-sama dan dari masyarakat sendiri. Menurut Tilaar, Administrasi dan manajemen pendidikan yang berdasarkan kepada *community based education* akan dengan sendirinya menampilkan wajah yang lain dari dewasa ini yaitu yang telah mengasingkan lembaga pendidikan sekolah dari jangkauan masarakat lokal.

Bersamaan dengan diterapkannya kebijaksanaan otonomi daerah dan otonomi pengelolaan pendidikan khususnya, telah diluncurkan konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS meletakkan kekuatan dasar sekolah pada masyarakat dan pada potensi internal sekolah. Dengan konsep ini pemerintah tidak akan terlalu banyak mencampuri lagi penyelenggaraan sekolah dan akan menyerahkannya kepada sekolah untuk dikelola bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya (Suyanto dan Abbas, *ibid* : 75). Jadi keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dan sifat sekolah yang responsif terhadap tuntutan masyarakat merupakan dua faktor yang paling menentukan dalam penglolaan pendidikan di era otonomi.

Louis V. Gestner Jr. dalam bukunya *Reinventing Education* (1995) seperti yang dikutip oleh Suyanto dan Abbas (*ibid* : 33-34) menyatakan bahwa sosok sekolah masa depan mensyaratkan orang tua dan masyarakat berperan serta dalam menunjang pendidikan. Apalagi dalam era otonomi sekolah, tandas Suyanto dan

Abbas, peran serta orang tua dan masyarakat hendaknya tidak hanya dalam hal pendanaan saja, melainkan juga dalam pengelolaan dan penilaian kinerja sekolah serta penciptaan suasana yang kondusif sehingga antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat terjadi kinerja yang sinergis, terpadu, dan selaras. Kerjasama yang harmonis antara ketiga unsur tersebut dapat memacu anak didik untuk lebih giat belajar dan meningkatkan prestasinya. Suasana seperti inilah sebenarnya yang didambakan oleh sekolah, siswa, dan orang tua.

Kita menyadari betul akan pentingnya peran serta keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sehingga kita menjadikannya sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan. Arah kebijakan tersebut adalah *“Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai”* (GBHN Tahun 1999-2004 Tap No. IV/MPR/1999). Bahkan jauh sebelumnya UUSPN tahun 1989 pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa *masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.*

Berdasarkan PP No. 39 Tahun 1992 fungsi peran serta masyarakat adalah untuk memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional (pasal 2). Sedangkan tujuannya adalah untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 3).

Selanjutnya dalam pasal 4 PP yang sama dijelaskan bahwa bentuk peran serta masyarakat dapat berupa :

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan
3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli
4. Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional.
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa dan bentuk lain yang sejenis.
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
8. Pemberian kesempatan untuk magang dan atau latihan kerja.
9. Pemberian bantuan manajemen
10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan
11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian;

Menurut Keith dan Girling (1991:275) tingginya partisipasi masyarakat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengelolaan pendidikan yaitu terutama berupa tambahan sumber daya, dukungan politik, kesempatan untuk inovasi dan pengembangan profesi, serta meningkatnya prestasi murid. Selanjutnya Keith dan Girling mengatakan bahwa tingginya tingkat keterlibatan sekolah masyarakat merupakan salah satu jalan menuju terciptanya lingkungan sekolah yang lebih responsif terhadap kliennya. Selengkapny mereka mengatakan :

“A high level of school community involvement is one of several avenues toward creating a more client responsive school environment. The better the school knows the community and the better the community knows the school, the greater the possibilities for tailoring schools to meet client needs. Restructuring school provide more learning options, a stronger curricular focus, and a greater sense of community requires the active participation of parents, teachers, administrators, and students. Involvement and responsiveness are part and parcel of the same educational process - a process that requires participation and careful management.”



Dalam sejarah pendidikan di Indonesia sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan kita memang pada awalnya didirikan oleh masyarakat terutama dalam bentuk pesantren. Sistem pendidikan pesantren pada dasarnya merupakan pendidikan yang *indigenous* yaitu pendidikan yang lahir dari kebutuhan dan untuk masyarakat di mana lembaga itu hidup (Tilaar, 1999:114).

Sementara itu, sejalan dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, ekonomi sosial, budaya dan seluruh aspek kehidupan masyarakat, diperlukan suatu sistem pendidikan nasional yang selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh Karena itu pembaharuan (inovasi) sistem pendidikan adalah suatu keharusan dan akan terus diperlukan. Begitu pentingnya inovasi dalam pendidikan sehingga Tilaar (*ibid*:61) mengatakan bahwa pendidikan yang tidak inovatif yang mematikan kreativitas generasi muda, berarti tidak memungkinkan suatu bangsa untuk bersaing dan hidup di dalam masyarakat modern yang akan datang.

Untuk merespon terhadap berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat dan seluruh aspek kehidupannya termasuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan suatu sistem pengelolaan pendidikan yang lebih akomodatif. Oleh karena itu sebagian anggota masyarakat yang peduli terhadap pembangunan

pendidikan bangsa berinisiatif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan alternatif dengan harapan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Salah satu bentuk lembaga pendidikan yang kini sedang *menjamur* dan menjadi *trend* sekolah alternatif pilihan masyarakat adalah apa yang kita kenal sebagai **sekolah terpadu** atau **sekolah unggulan** atau **sekolah plus** yang karena jam belajarnya dari pagi sampai sore sekolah-sekolah seperti ini dikenal juga sebagai "*fullday school*".

Bermunculannya sekolah-sekolah terpadu dan sejenisnya nampak merupakan jawaban atas ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan hasil pendidikan sekolah "biasa" (Natawijaya dalam Mimbar Pendidikan IKIP Bandung No. 3 Tahun 1996;13). Penyelenggaraan pendidikan selama ini dirasakan tidak atau kurang akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah umum selama ini lebih bersifat birokratik, feodalistik, kaku, dan lebih merefleksikan kepentingan pemerintah atau yayasan penyelenggara. Bahkan pendidikan modern dikatakan oleh Paulo Freire (dalam Tilaar, *ibid* : 114) sebagai lembaga-lembaga tirani yang mematikan inisiatif karena antara lain hilangnya partisipasi masyarakat di dalam pengelolaannya.

Masyarakat sudah sejak lama mendambakan sekolah yang unggul yang benar-benar dapat memberikan sumbangan berarti bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Konsep sekolah unggul seperti yang digambarkan dalam makalah Tim IKIP Bandung (1993) dalam Mimbar Pendidikan (No. 3 Tahun 1996:8) bahwa *keunggulan program sekolah unggul tidak berbeda dari*



sekolah biasa, melainkan terletak kepada upaya mengolah dan mengaitkan program (yang juga mungkin digunakan di sekolah biasa) ke dalam bahan ajar yang lebih bermakna bagi perkembangan siswa. Perluasan, pendalaman, pemunculan bidang kajian khusus, dan keterpaduan program belajar merupakan keunggulan dalam komponen program sekolah unggul.

Disebutkan pula bahwa program-program sekolah unggul tersebut menyangkut dimensi program pengembangan : (1) kemampuan intelektual/akademis yang mengarah kepada penguasaan ilmu dan teknologi; (2) keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang mengarah kepada pemahaman dan perwujudan nilai-nilai agama di dalam kehidupan sehari-hari; (3) kemampuan berkomunikasi yang mengarah kepada penguasaan bahasa sebagai alat berfikir dan berkomunikasi; (4) kemandirian berfikir, wawasan kemasyarakatan, kreativitas, kepemimpinan, dan tanggungjawab.

Mewujudkan sekolah yang bermutu (unggul) itu tentu bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, sekolah dituntut untuk dapat memberdayakan seluruh sumber daya yang dimiliki baik internal maupun eksternal. Salah satu sumber daya eksternal yang sangat penting untuk dimanfaatkan adalah potensi yang dimiliki oleh orang tua dan masyarakat. Tanpa mengoptimalkan peran serta orang tua dan masyarakat berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan sulit diharapkan dapat berjalan dengan efektif. Itulah sebabnya perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaannya untuk menunjang keberhasilan program sekolah.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah *upaya untuk membangun diri dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi*

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Ginanjar Kartasmita (1997) dalam Deni Rohendi, 2002:9). Kindevatter (1979) seperti yang dikutip oleh Supriyono (2000:35) mendefinisikan pemberdayaan *sebagai upaya penyadaran peningkatan daya-daya pada seseorang atau kelompok untuk memahami dan mengontrol dimensi-dimensi kekuatan yang dimiliki (religi, fisik, psikis, sosial ekonomi, politik dan kebudayaan) untuk meningkatkan kedudukan mereka di masyarakat. Dengan pemberdayaan ini diharapkan khalayak sasaran memiliki kepercayaan diri (self-reliance) dan produktivitas kerja yang tinggi.*

Dalam konteks manajemen sekolah pemberdayaan peran serta orang tua dan dalam masyarakat adalah *upaya-upaya untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan potensi yang dimilikinya untuk berpartisipasi secara aktif untuk menunjang keberhasilan program sekolah secara optimal efektif dan efisien.*

Menurut suyanto dan Abbas (2001:78) partisipasi masyarakat selama ini dipahami oleh para pelaksana pembangunan di daerah sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Padahal menurut Lukman Sutrisno (1995) seperti yang dikutip oleh Suyatno dan Abbas (*ibid*) partisipasi masyarakat seharusnya, dipahami sebagai kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Sebagai sebuah kerjasama, maka masyarakat tidak lagi menjadi sebuah sub sistem yang diposisikan sebagai penerima program pembangunan. Masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu

diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan suatu program pembangunan.

Sementara itu yang dimaksud dengan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam program sekolah adalah *“kesadaran dan kepedulian masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas untuk turut serta mengambil keputusan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan suatu program pendidikan di sekolah secara proporsional yang dilandasi kesepakatan.”* (Tim Pokja MBS, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, 2001:66).

Sedangkan yang dimaksud dengan program sekolah, identik dengan program pendidikan, adalah keseluruhan dari penawaran sekolah termasuk kegiatan di luar kelas dan susunan serta rangkaian mata pelajaran dan kegiatan (Sutisna, 1993:48).

Upaya pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat itu pun ternyata tidak mudah. Di masyarakat kita, yang sudah terbiasa diperlakukan sebagai objek pembangunan, seringkali kata peran serta diartikan sebagai menerima dan mendukung saja apa yang dilaksanakan oleh pihak birokrat. Pendekatan ini juga diperburuk lagi dengan masih melekatnya budaya feodal dalam kehidupan modern yang oleh Fatah (1994 dalam Suyanto dan Abbas, *ibid* : 77) disebut sikap paternalistik dan hubungan patron klien yang memposisikan masyarakat pada posisi yang lebih rendah seperti “bapak dan anak” dimana sang anak dituntut untuk menerima, mematuhi, dan mendukung apa saja yang diputuskan sang ayah.

Dikatakan oleh Suyanto dan Abbas (*ibid*:110) bahwa keterlibatan unsur orang tua siswa dan masyarakat ke dalam program sekolah baru sebatas partisipasi pada aspek pendanaan kebutuhan sekolah dan belum banyak menyentuh aspek manajerial dan penetapan serta pelaksanaan suatu kebijakan. Pada era reformasi saat ini, tingkat keabsahan pelibatan masyarakat ke dalam pengelolaan pendidikan di sekolah perlu lebih didorong sehingga menyentuh pula perumusan-perumusan kebijakan sekolah.

Mengingat besarnya pengaruh peran serta orang tua dan masyarakat terhadap keberhasilan program pendidikan, perlu kiranya dilakukan upaya-upaya pemberdayaan. Agar dapat mengoptimalkan upaya-upaya pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat, maka sekolah perlu menerapkan manajemen strategik. Manajemen sekolah harus mampu menyusun strategi pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam upaya mewujudkan program sekolah secara efektif.

Strategi yang dimaksud seperti yang dikemukakan oleh Robson (1997:5) sebagai berikut, "*strategy is the pattern of resource allocation decisions made throughout an organisation. These encapsulate both desired goals and beliefs about what are acceptable and, most critically, unacceptable means for achieving them.*" (strategi adalah pola keputusan alokasi sumber daya yang dibuat di seluruh organisasi, strategi meliputi baik sasaran-sasaran yang diinginkan maupun keyakinan-keyakinan tentang cara-cara apa yang dapat diterima, dan yang paling penting lagi, yang tidak dapat diterima untuk mencapainya).

Manajemen strategis, seperti yang digambarkan oleh Hannagan (1998:120) adalah rencana tindakan yang memungkinkan suatu organisasi untuk bergerak dari tempat sekarang berada menuju suatu tempat masa yang akan datang. Hannagan, di tempat lain, mengatakan, *“strategic management is concerned with looking ahead to establish the way forward for an organization. This involves developing plans for strategic change.”* (hal. 142).

Purwanto (dalam Biro Perencanaan Pendidikan Nasional 2000) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan keluarga tentang peran strategis dan tanggung jawab mereka untuk dapat terselenggaranya pendidikan nasional yang baik diperlukan inovasi tersendiri mengingat ajakan partisipasi yang dilakukan selama ini sudah terlalu “rutin” bagi masyarakat.

Kenyataan sekarang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah masih menggunakan pola lama dalam mengakomodasi peran serta masyarakat. Akibatnya potensi yang ada di masyarakat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat pun seakan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekolah. Orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anaknya kepada sekolah. Itulah sebabnya sekolah-sekolah kita semakin jauh dari harapan anak didik, orang tua dan masyarakat atau dengan kata lain sekolah-sekolah kita kurang responsif terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Fenomena seperti meningkatnya angka putus sekolah, nilai-nilai ujian yang cenderung menurun, bergesernya pilihan keluarga berpenghasilan tinggi dari sekolah negeri ke sekolah swasta, dan semakin tingginya angka pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh para pelajar

adalah bukti-bukti akan adanya ketidakpuasan siswa, orang tua dan masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah selama ini seperti yang dikemukakan oleh Keith dan Girling (1991:270) sebagai berikut :

Making schools more responsive to the needs of students (more student-centered) is the ultimate challenge to contemporary public education. Indicators of nonresponsiveness are legion: The increasing high school drop out-rate; the declining test score trends; the shift of upper-income families in some communities from public to private schools particularly in urban areas; and the growth of student discipline problems are all signs that there is a growing gulf between what school offer students and what students and parents want and get from schools.

Apabila keadaan seperti yang digambarkan oleh Keith dan Girling di atas tidak segera diatasi maka dikhawatirkan apa yang kita dambakan sebagai pendidikan yang bermutu (unggul) tidak akan tercapai. Hal ini pun tentu akan mengancam pada pencapaian tujuan pendidikan nasional secara umum.

Namun demikian, di tengah kekhawatiran akan rendahnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam program sekolah yang berakibat pada rendahnya efektivitas pengelolaan sekolah, MIT Asih Putra Cimahi justru diakui telah berhasil meningkatkannya. Keberhasilan meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat ini tentu bukanlah suatu kebetulan melainkan hasil jerih payah seluruh komponen sekolah dalam mengembangkan suatu strategi pemberdayaannya. Orang tua dan masyarakat tidak hanya berperan serta dalam pendanaan melainkan juga perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah serta dalam penciptaan suasana yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif. Sebagai contoh, orang tua berperan aktif dalam merumuskan visi, misi dan tujuan sekolah, merencanakan program sekolah, penyusunan RAPBS,

pemilihan kepala sekolah (mulai dari pemilihan calon sampai menjadi anggota juri dalam presentasi calon kepala sekolah), mengedit bahan pelajaran, mengawasi kinerja kepala sekolah dan guru, menjadi panitia kegiatan ekstrakurikuler, menyumbangkan buku, ikut serta dalam seminar-seminar pengelolaan sekolah unggulan, berbagi pengalaman dengan guru dan kepala sekolah tentang hasil kunjungannya ke sekolah-sekolah di luar negeri, dan menjadi pembicara dalam acara “*talkshow*” dengan siswa dalam acara-acara tertentu seperti peringatan “Hari Kartini”.

Fenomena ini sungguh menarik dan sangat berharga untuk dikaji lebih lanjut melalui penelitian mengingat saat ini tengah digulirkannya kebijakan otonomi pengelolaan pendidikan yang berimplikasi pada pemberdayaan sekolah, pemberdayaan guru, pemberdayaan murid, pemberdayaan orang tua dan masyarakat sebagai realisasi dari konsep-konsep “baru” pengelolaan sekolah yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Manajemen Berbasis Masyarakat.

Terdorong oleh keinginan untuk mengungkap lebih jauh tentang upaya pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah, penulis kemudian melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PEMBERDAYAAN PERAN SERTA ORANG TUA DAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM SEKOLAH” (Kajian tentang Pengelolaan Sekolah Sehari Penuh (Fullday School) di Madrasah Ibtidaiyah Asih Putra Cimahi Tahun 2002”)**.

B. Masalah Penelitian

Peran serta orang tua dan masyarakat terhadap sekolah seharusnya tidak hanya dalam hal pembiayaan, melainkan juga dalam manajemen penyelenggaraannya. Orang tua dan masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sekolah yang meliputi : (1) pengambilan keputusan, (2) pelaksanaan, dan (3) mengevaluasi program pendidikan di sekolah (Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2001:66, Suyanto dan Abass : 2001 dan Indra Djati Sidi : 2001).

Sekolah sebagai organisasi modern haruslah senantiasa dikendalikan oleh visi dan misi organisasi sekolah. Visi dan misi yang baik hendaklah merupakan produk bersama (*shared vision*) antara kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat setempat (Suyanto dan Abbas, 2001 : 118)

Salah satu kunci sukses melibatkan orang tua dalam program sekolah menurut Depdiknas (1999 : 152) adalah memelihara keakraban hubungan sekolah dengan mereka, yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah melalui cara-cara berikut :

- a. Melakukan komunikasi secara intensif
- b. Melibatkan orang tua sebagai sponsor/panitia kegiatan di sekolah
- c. Memberi peran kepada orang tua untuk mengambil keputusan, sehingga merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya.
- d. Mendorong guru untuk melibatkan orang tua dalam menunjang keberhasilan belajar siswa.

Kemudian Depdiknas memberikan langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh kepala sekolah untuk mendorong orang tua untuk aktif dalam kegiatan sekolah, yaitu :

- a. Melakukan identifikasi kebutuhan sekolah dan bagaimana orang tua dapat membantu pada kegiatan tersebut.
- b. Menyusun uraian tugas untuk posisi-posisi yang mungkin dapat dibantu oleh orang tua sebagai relawan.
- c. Membantu guru untuk menyusun program relawan yang terkait dengan tugasnya.
- d. Menginformasikan program relawan tersebut lengkap dengan deskripsi tugas untuk setiap posisi.
- e. Mengundang orang tua yang bersedia untuk menjadi relawan.
- f. Memberikan penghargaan bagi orang tua yang telah melaksanakan tugas sebagai relawan.

Sedangkan untuk mengaktifkan BP3, kepala sekolah dapat menempuh beberapa cara berikut :

- a. Memperhatikan masa kepengurusan dan melaksanakan pembentukan pengurus BP3 secara periodik.
- b. Ikut aktif melaksanakan program BP3
- c. Memberdayakan badan pemeriksa BP3
- d. Melibatkan pengurus BP3 dalam setiap kegiatan sekolah
- e. Melakukan pembinaan dan pemantauan secara aktif dan berkala.

Diampaiing itu, untuk meningkatkan minat masyarakat terlibat dalam program sekolah, kepala sekolah dapat menempuh beberapa cara berikut :

- a. Melibatkan orang-orang kunci dalam kegiatan sekolah, khususnya yang sesuai dengan minatnya.
- b. Melaksanakan program-program kemasyarakatan
- c. Mengadakan buletin sekolah atau majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah untuk diinformasikan kepada masyarakat.
- d. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah.
- e. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat.

Berkenaan dengan model hubungan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat, Keith dan Girling (1991 : 256) menyebutkan ada tiga model hubungan antara sekolah dengan orang tua dan masyarakat sebagai konstituen yaitu (1) *the profesional/client model*, (2) *the advocacy model*, dan (3) *the partnership model*.

Model pertama didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan adalah layanan spesialis yang harus disampaikan oleh profesional (guru) kepada kliennya (murid). Model ini beranggapan bahwa seorang profesional memiliki pengetahuan dan keahlian dan bahwa klien menginginkan atau membutuhkan pengetahuan dan keahlian tersebut. Lebih dari itu pelatihan, pengetahuan dan pengalamannya menempatkan dirinya dalam posisi memiliki kewenangan untuk mendiagnosa masalah-masalah dan kebutuhan klien dan untuk menentukan tindakan apa yang sesuai dengan diagnosa tersebut. Jadi kliennya pasif dan hanya menjadi penerima jasa profesional. Model ini menggambarkan konfigurasi spesifik tingkah laku partisipatori bagi klien. Motif partisipasinya adalah keinginan untuk mendapatkan pengetahuan dan keahlian sang profesional. Begitu pula yang terjadi di sekolah, di mana murid datang untuk mempelajari apa yang mampu diajarkan oleh gurunya. Orang tua mengirimkan anaknya ke sekolah didasarkan pada premis bahwa guru memiliki pengetahuan dan keahlian untuk dipelajari anak-anak mereka. Apa yang akan dipelajari biasanya tidak terbuka untuk dibicarakan dengan klien.

Komunikasi antara murid dan guru hanya terjadi satu arah. Begitu pula yang terjadi antara sekolah dengan konstituen yang lain, khususnya orang tua siswa. Guru menjadi inisiator komunikasi sedangkan orang tua menjadi responden. Komunikasi pun terjadi hanya seputar evaluasi atau penyampaian informasi. Model hubungan seperti ini yang umumnya terjadi di sekolah-sekolah negeri tidak mendorong partisipasi orang tua secara aktif dan berkelanjutan.

Model kedua, *advocacy model*, ialah dimana konstituen memusatkan perhatiannya pada partisipasi politik dari pada partisipasi dalam proses

pendidikan itu sendiri. Motif yang mendasari tuntutan akan keterlibatan dalam pembuatan keputusan datang dari perspektif orang tua bahwa keputusan yang sedang dibuat bertentangan dengan kepentingan anak-anak mereka, baik keputusan tentang kurikulum, penggunaan dana, pengangkatan guru, maupun kebijaksanaan disiplin sekolah. Dalam hal komunikasi, orang tua menjadi penghasut. Komunikasi biasanya diartikan sebagai kritik atau tuntutan. Partisipasi seperti ini lebih berfungsi sebagai kekuatan oposisi dari pada mendukung proses atau reformasi pendidikan yang positif dan bergerak dalam arena politik dan bukannya menjadi bagian dari organisasi sekolah.

Model ketiga, *partnership model*, terjadi manakala keluarga, sekolah, dan masyarakat bekerja sama untuk menghasilkan prestasi pendidikan dengan inisiatif dan tanggung jawab bersama. Model ini menitikberatkan pada keinginan pribadi sebagai motif pendorong bagi orang tua maupun kelompok masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan sekolah. Partnership mengembangkan partisipasi yang melibatkan hampir setiap orang-murid, orang tua, guru, administrator, warga negara, perusahaan-perusahaan dan segala jenis organisasi lokal. Semua orang yang berkepentingan dianggap bermanfaat dan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Pada model ini orang tua dan masyarakat tidak memusatkan perhatiannya pada pembuatan keputusan dan kebijakan pendidikan melainkan pada kegiatan-kegiatan lain seperti dukungan sumber daya pendidikan dan dana, dorongan pekerjaan rumah, dan dorongan langsung kepada guru kelas anak-anaknya.



Dilihat dari segi hasil, tingginya peran serta orang tua dan masyarakat dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengelolaan pendidikan, yaitu terutama berupa tambahan sumber daya, dukungan politik, kesempatan untuk inovasi dan pengembangan profesi, serta meningkatnya prestasi murid (Keith dan Gurling, 1991 : 275).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menjadikan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimanakah strategi pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah di MI Asih Putera Cimahi ?

Kemudian, agar fokus masalahnya menjadi lebih jelas, penulis menjabarkannya menjadi pertanyaan-pertanyaan berikut :

1. Bagaimana Profil dan Filosofi Pendidikan MI Asih Putera?
 - a. Profil MI Asih Putera
 - 1) Bagaimanakah profil badan penyelenggara MI Asih Putera?
 - 2) Bagaimana sejarah singkat pendirian MI Asih Putera?
 - 3) Bagaimana keadaan personil MI Asih Putera?
 - 4) Bagaimanakah perkembangan animo masyarakat sejak didirikan?
 - 5) Berapa banyak lulusan yang telah dihasilkan dan ke mana mereka melanjutkan sekolahnya?
 - 6) Bagaimanakah pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar?
 - 7) Bagaimana tanggapan orang tua terhadap keberadaan MI Asih Putera?
 - b. Filosofi Pendidikan MI Asih Putera
 - 1) Bagaimanakah konsep pendidikan menurut MI Asih Putera?

- 2) Apakah visi, misi, dan tujuan MI Asih Putera?
 - 3) Bagaimana profil lulusan MI Asih Putera yang diharapkan?
 - 4) Bagaimanakah Program Pendidikan MI Asih Putera?
2. Bagaimana pengelolaan hubungan sekolah dengan orang tua dan Masyarakat dilaksanakan?
- a. Bagaimanakah pengelolaan hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat dilaksanakan?
 - b. Dengan pihak-pihak mana saja MI Asih Putera menjalin hubungan dan dalam bentuk apa?
 - c. Media apa yang digunakan MI Asih Putera untuk menjalin hubungan dengan orang tua dan masyarakat?
 - d. Model hubungan apa yang dikembangkan oleh MI Asih Putera dengan orang tua dan masyarakat sebagai konstituennya?
3. Bagaimanakah strategi pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah yang dilaksanakan oleh MI Asih Putera?
- a. Apa yang melatarbelakangi dilakukannya upaya pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah dan apa tujuannya ?
 - b. Bagaimakah program MI Asih Putera?
 - c. Hambatan-hambatan apa yang ditemui MI Asih Putera dalam melaksanakan programnya?
 - d. Faktor internal dan eksternal apa yang mendukung upaya pemberdayaan tersebut?

- e. Strategi apa yang digunakan MI Asih Putera dalam upaya pemberdayaan tersebut?
 - f. Bagaimanakah tanggapan orang tua dan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan tersebut?
4. Bagaimana dampak strategi diambil dalam upaya pemberdayaan terhadap efektivitas program sekolah?
- a. Dalam bentuk apakah peran serta orang tua dan masyarakat itu diperoleh? Sejauhmanakah keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah?
 - b. Sejauhmanakah peran serta orang tua dan masyarakat mendukung efektivitas program sekolah?
 - c. Prestasi apakah yang telah diraih oleh MIT Asih Putera baik dalam bidang akademik maupun non-akademik?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang ditempuh oleh MI Asih Putera Cimahi dalam upaya meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Profil dan filosofi pendidikan MI Asih Putera

2. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat yang dilaksanakan MI Asih Putera
3. Strategi pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah
4. Dampak upaya pemberdayaan terhadap efektivitas program sekolah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian tersebut dapat dicapai dan masalah penelitian dapat ditemukan jawabannya, diharapkan hasil penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru dalam pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat serta upaya-upaya meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang responsif, efektif, dan efisien.
2. Bagi para penyelenggara dan pengelola pendidikan baik dasar maupun menengah, negeri maupun swasta, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dalam upaya meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam program sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

3. Bagi pengelola MI Asih Putra Cimahi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan sekolah khususnya dalam pengelolaan peran serta orang tua dan masyarakat di masa yang akan datang dalam mengupayakan pencapaian visi dan misinya memenuhi harapan masyarakat.

E. Premis Penelitian

Berikut adalah asumsi yang mendasari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Asumsi-asumsi tersebut adalah :

1. Pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Bahkan secara ekstrim pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Oleh karena itu pendidikan adalah masalah setiap orang. Membicarakan pendidikan adalah membicarakan masa depan bangsa. Mengabaikan pendidikan berarti mengabaikan masa depan bangsa. Krisis multi dimensional yang tengah dialami bangsa kita saat ini diakibatkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai akibat dari rendahnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara (Tampubolon : 2001).
2. Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang bermutu dan terpadu bagi anak-anaknya. Setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya

mendapatkan pendidikan yang memadukan antara pendidikan intelektual dan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dan seimbang.

3. Keberhasilan upaya pendidikan banyak dipengaruhi oleh administrasi atau manajemen pendidikan (Engkoswara : 2001). Manajemen pendidikan selama ini bersifat sentralistik yang telah mengakibatkan sulitnya meningkatkan mutu pendidikan. Menejemen sentralistik mengakibatkan : *pertama*, kepala sekolah, guru dan karyawan sekolah tidak merasa sepenuhnya bertanggung jawab terhadap berbagai kelemahan proses yang berlangsung di dalamnya, karena ketidakmandiriannya dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan; *kedua*, masyarakat sekitar sekolah dan orang tua siswa tidak merasa sepenuhnya memiliki sekolah yang akibatnya tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberadaannya (Suyanto dan Abbas, 2001)
4. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu disyaratkan keterlibatan semua pihak; orang tua, masyarakat dan pemerintah. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Keberhasilan pendidikan adalah keberhasilan kolektif ketiga elemen tersebut (Biro Perencanaan Depdiknas, 2000; Engkoswara, 2001; Suyanto dan Abbas, 2001).
5. Peran serta orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan saat ini dirasakan masih rendah. Itu pun baru dalam hal pendanaan dan belum menyentuh aspek manajerial. Lebih dari itu,

orang tua dan masyarakat seharusnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan program sekolah (Indra Djati Sidi : 2001, Suyanto dan Abbas : 2001, Tim Pokja *School Based Management* Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2001)

6. Mengingat besarnya arti dukungan peran serta orang tua dan masyarakat terhadap keberhasilan program sekolah, maka perlu dilakukan upaya-upaya pemberdayaannya agar potensi yang dimiliki oleh orang tua dan masyarakat baik berupa dana dan maupun non-dana dapat dimanfaatkan secara optimal (Keith dan Girling, 1991; C. Turney et. al., 1992; Suyanto dan Abbas, 2001; Indradjati Sidi , 2001)

F. Paradigma/Kerangka Penelitian

Yang dimaksud dengan paradigma penelitian (seperti yang disimpulkan oleh Sugiono, 2000 : 25) adalah pandangan atau model, atau pola pikir yang dapat menjabarkan berbagai variabel yang akan diteliti kemudian membuat hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya, sehingga akan mudah dirumuskan masalah penelitiannya, pemilihan teori yang relevan, rumusan hipotesis yang diajukan serta kesimpulan yang diharapkan.

Paradigma penelitian ini dapat dilihat pada bagan 1 halaman 29. Bagan tersebut menjelaskan bahwa kondisi sekolah yang diharapkan adalah sekolah yang memiliki keunggulan baik komparatif maupun kompetitif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; hubungan dengan orang tua dan masyarakat

bersifat kemitraan; peran serta orang tua dan masyarakat terhadap program sekolah optimal baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, maupun dalam pengawasan; serta program sekolah dapat terlaksana secara efektif. Namun dalam kenyataannya peran serta orang tua dan masyarakat terhadap pengelolaan program sekolah masih dirasakan sangat rendah itu pun baru dalam hal pendanaan; sekolah kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat; hubungan sekolah dengan orang tua dan masyarakat bersifat feodalisitik; sementara potensi orang tua dan masyarakat belum termanfaatkan secara optimal sehingga program sekolah berjalan kurang efektif.

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan ini menimbulkan masalah. Masalahnya adalah bagaimana meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan program sekolah secara optimal sehingga program sekolah dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Untuk itulah diperlukan upaya-upaya pemberdayaannya. Namun demikian karena upaya pemberdayaan ternyata bukan hal yang mudah maka perlu disusun strategi yang tepat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana strategi pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah untuk mewujudkan sekolah yang efektif (unggul).

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan ditemukan suatu model pemberdayaan peran serta orang tua dan masyarakat dalam program sekolah.

